

BAB II

PASAR BEBAS-APEC DAN DEMOKRATISASI EKONOMI INDONESIA

Usaha untuk mewujudkan demokrasi sistem ekonomi suatu bangsa adalah merupakan dari pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian supaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus karena demokrasi sistem ekonomi merupakan bagian integral sistem yang tertinggi dari subsistem kehidupan sosial suatu bangsa.

Pandangan pemerintah Indonesia dalam faham ketahanan nasional, bahwa demokratisasi sistem ekonomi memerlukan demokratisasi dalam sistem sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. (Anwar Nasution, 1994: 59)

Pada gilirannya persoalan pemerataan --sebagaimana dimaksud dalam trilogi pembangunan (pemerataan, pertumbuhan, stabilitas)-- terposisikan sebagai persoalan diantara dua asas utama perencanaan pembangunan lainnya. Perlahan-lahan berkehendak menciptakan tatanan masyarakat yang adil-berkemakmuran dan makmur-berkeadilan cenderung utopis. Padahal, seperti yang dikemukakan Soedjatmoko (1985: 15), kelangsungan hidup suatu masyarakat dalam peralihan yang cepat sebagian besar tergantung pada kemampuan negara dalam memelihara perimbangan yang dinamik antara perubahan dan pembangunan, ketertiban dan kesetabilan serta persepsi keadilan sosial yang cenderung terus menerus berubah.

Begitu juga bila kita hendak memahami secara komprehensif diskursus ekonomi pada tingkat global-internasional. Persoalan politik senantiasa menyertai sebagai suatu yang tidak terelakkan. Maka tatkala Indonesia memastikan diri memasuki konstelasi ekonomi global dalam rangka pembangunan ekonomi politik internasional yang tentu lebih pelik (Mochtar Mas'oe'd, 1994: 2)

Keterlibatan Indonesia pada APEC dan pemilihan sikap meratifikasi GATT adalah seharusnya didudukkan pada paradigma di atas, sejauh ini keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan mekanisme pasar bebas tersebut telah banyak melahirkan pendapat pro-kontra di kalangan pengamat --ekonomi maupun politik. Secara umum, hal ini terjadi berangkat dari kesamaan postulat bahwa discoursus APEC sama sekali tidak murni persoalan ekonomi. Dari kebijakan liberalisasi yang diterapkan tampak, bahwa penyelenggaraan APEC adalah suatu persoalan yang terkait dengan soal politik.

Amin Rais mengatakan, bahwa Indonesia tidak akan lagi dapat mengelak dari proses liberalisasi ekonomi global. Setelah *final act* perjanjian umum tentang perdagangan dan tarif (GATT) dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Disatu sisi, memang terdapat optimisme bahwa proses liberalisasi dan penurunan tarif yang berlaku global ini akan dapat meningkatkan efesiensi

Karena dapat dikatakan bahwa pasar bebas adalah perwujudan dari apa yang disebut Smith sebagai perwujudan sistem kebebasan kodrati dan keadilan. Dilain pihak Smith yakin bahwa bahwa sistem pasar bebas itu akan berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai sebuah sistem sosial yang harmonis justru karena ditunjang oleh keadilan sebagai aturan main utama paling minim bagi interaksi bisnis para pelaku ekonomi sistem pasar bebas bahkan merupakan sistem sosial harmonis menyerupai tatanan kosmis (A. Sony Keraf, 1996: 197)

Munculnya ide pembentukan APEC, sebenarnya memang berawal dari kesadaran bahwa kawasan di Asia Pasifik terdapat potensi ekonomi yang luar biasa. Disitu terdapat kekuatan rekayasa ekonomi yang luar biasa. Disitu terdapat kekuatan raksasa ekonomi dunia seperti AS dan Jepang, juga terdapat negara dengan pasar bersekala besar semacam China, juga Indonesia. Mengingat itu, abad 21 memang akan menjadi abad Asia-Pasifik.

Di Eropa misalnya, berakhirnya perang dingin kian memperlancar pasar tunggal Eropa lewat apa yang disebut *Eurcpen Union* (Uni Eropa) di tahun 1993 (A. Tonu Prasentiantono, 1995: 359). Sedangkan di Amerika Utara, hasil kesepakatan bersama antara AS, Kanada dan Meksiko, melahirkan sebuah economic arrangement yang selanjutnya dikenal dengan nama *North American Free Trade*

Agreement (NAFTA) (Awani Irewati, 1995a: 77). Sementara di belahan Asia, dinamika ekonomi Asia Timur telah memberi warna baru bagi ekonomi dunia sebagai a *center of economic power*. Dimulai dengan munculnya negara-negara industri baru (Newly Industrialized Economies/NIEs), seperti Jepang di paruh tahun 1960-an. Yang kemudian diikuti Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura (GATRA, 19 November 1994: 35)

Terbentuknya APEC --dalam rangka realisasi GATT/WTO (*General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization*) dan menyikapi gagalnya *Uruguay Round* (GATRA, 19 Nopember 1994: 35)-- berawal dari mulai munculnya PECC (*Pacific Economic Cooperation Council*) di tahun 1980. Salah satu kegiatan PECC adalah terbentuknya APEC di Canberra, Australia pada tahun 1989 (Muhtar Mas'oed, 1994: 57). Ketika itu keanggotaan awal berjumlah 12 negara anggota, yaitu: Australia, Selandia Baru, enam negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai, Thailand dan Philipina), Jepang, AS, Korsel (Awani Irewati, 1995a: 78). Lalu tahun 1991, menerima China, Hongkong dan Taiwan, dan dalam pertemuan APEC di Seattle, AS pada Nopember 1993 memasukkan Papua Nugini dan Meksiko, Sehingga keanggotaannya meliputi 17 negara (Moctar Mas'oed, 1994: 57). Hingga ketika pertemuan Bogor, Nopember 1994, keanggotaannya

bertambah menjadi 18 negara dengan masuknya Chili (GATRA, 19 Nopember 1994).

Berangkat dari pertemuan sebelumnya hingga pertemuan Osaka Jepang, Nopember 1995, APEC didesain sebagai sebuah forum kerja sama ekonomi, bukan *free trade area*. Merupakan forum informal untuk saling tukar informasi, berbagai pengalaman dalam kebijakan makro, serta membentuk guidelines secara bersama. Puncak dari tahapan-tahapan ini adalah tawar menawar serta koordinasi kebijakan dan independensi internasional, melalui tahapan tersebut forum ini menjadi "ketat" dan mengikat (A. Tony Prasetiantono, 1995: 352).

Kendati demikian, tetap saja muncul keraguan bahwa APEC akan sekedar menjadi forum konsultasi tanpa komitmen dan action yang jelas. Kesangsian terhadap efektifitas forum ini tetap merebak. Jika forum konsultasi dan koordinasi masih dianggap terlalu longgar, maka alternatifnya adalah suatu format kawasan perdagangan bebas (*free trade area*). Bentuk inilah yang diperdebatkan untung ruginya --sekalipun sebetulnya belum ada agreement ke arah sana.

Itulah, mengapa APEC memberikan penjadualan realisasi liberalisasi perdagangan invesatsi yang berbeda antar anggota. Pada pertemuan ELM APEC (*Economic Leader Meeting*) di Bogor, 14-15 Nopember 1994 dihasilkan suatu

konsensus bersama (Deklarasi Bogor) tentang penjadualan dimulainya liberalisasi. Komitmen tersebut menyangkut meniadakan proteksi perdagangan dan investasi dikawasan ini. Konsesus itu menyepakati pemberlakuan pemberlakuan perdagangan bebas investasi tahun 2020 bagi negara yang berkembang (Warta Ekonomi, 21 Nopember 1994: 14)'

Sedangkan liberalisasi secara etimologi, kata liberal memiliki status kata benda sekaligus kata sifat. Sebagai kata benda ia berarti penganut liberalism, sedang sebagai kata sifat bermakna bebas (John M. Echolas dan Hasan sadeli, 1986: 356). Semenatara secara terminologis, liberal dikenal sebagai suatu pandangan (atau orang) yang mendesak pemerintah untuk "berperan aktif" dalam mengubah kondisi sosial ekonomi yang tidak benar dan tidak adil (Didi Krisna, 1993: 95)

Sebagai paham ia disebut Liberalisme, suatu paham atau aliran ketatanegaraan politik dan ekonomi, yang dalam ketatanegaraan bercita-cita demokrasi, dan dalam ekonomi menganjurkan kebebasan berusaha dan berniaga tanpa campur tangan dan investasi pemerintah (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 594)

Pada prinsipnya liberalisasi ekonomi atau pasar bebas-APEC akan membawa dampak menguntungkan bagi masyarakat (baca: Indonesia) --rakyat akan mendapatkan

untuk mendukung strategi yang berorientasi keluar (*outward looking*), antara lain dengan mengurangi hambatan tarif dan non tarif dalam ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri. Sementara investasi diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. (Prasetiantono, 1995: XVII)

Adanya kesepakatan para pemimpin ekonomi APEC juga sepakat dalam menentukan landasan idiil (prinsip kemitraan, saling menghormati dan saling menguntungkan), konstitusional (GATT dan WTO) dan operasional --semua persetujuan APEC dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah-- untuk menjamin kerjasama ekonomi Asia-Pasifik yang berkelanjutan. (Warta Ekonomi, 1994: 18) Ini didasarkan atas disepakatinya "Deklarasi Bogor" yang menetapkan langkah-langkah menuju liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia-Pasifik.

Untuk itu asas liberalisasi ekonomi atau dunia usaha dalam pandangan Ahmad Muflih Saefuddin dalam bukunya Syafi'i Ma'arif dan Said Tuhuleley, tidak sebagaimana filsafat etika ekonomi kapitalisme yang berasaskan *laissez faire* (bebas, liberal), dan filsafat ekonomi sosialis yang berasas pertarungan kelas, filsafat ekonomi Islam berasaskan *tauhid* (Q.S. 39: 38)

Disamping di atas dalam liberalisasi perdagangan adalah makin terbukanya peluang pasar bagi negara-

negara anggota (khususnya Indonesia), di Indonesia sendiri, dengan terbukanya peluang Indonesia dalam memasarkan produksi Indonesia yang merupakan bagian dari munculnya liberalisasi perdagangan Indonesia juga akan mendapatkan aspek dibidang politis. (Hartarto, 1994: 18)

Produktifitas yang tinggi dan harga yang murah saja tidak menjamin suatu keberhasilan usaha. Meskipun merupakan kreteria utama dalam kompetisi bisnis, Cosmos Batubara dalam Kontak Bisnis mengatakan bahwa perlu adanya tambahan tersebut, antaranya adalah: *Pertama*, produktifitas --adanya peningkatan produksi disegala bidang, terutama dengan cara menciptakan peluang-peluang dilingkungan kondusif bagi munculnya motifasi pekerja demi menciptakan peningkatan produktifitas pada dunia usaha. *Kedua*, kualitas dalam mengembangkan dan menghasilkan produk dan jasa berkualitas, pelaku bisnis perlu mempertemukan perspektif perancang produk yang perspektif pelanggan tentang kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. *Ketiga*, keanekaragaman --untuk dunia usaha harus yang inovatif dan memberi tempat bagi timbulnya gagasan-gagasan atau ide baru. *Keempat*, penyesuaian dengan selera pelanggan dapat perhatian para produsen. *Kelima* --dalam ekonomi global yang kompleks, penyampaian suatu produk atau jasa secara

naan langkah-langkah pembangunannya, dan para pelaku negeri kita telah sepakat bahwa pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Dan di saat perkembangan perekonomian dunia yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional, telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Sepanjang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan hingga masa kepemimpinan rezim orde baru, pembangunan ekonomi Indonesia ditempuh dengan berbagai kebijaksanaan ekonomi yang cenderung fluktuatif-- seiring dengan perputaran waktu dan pergeseran masa. Keseluruhan kebijaksanaan ekonomi yang merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan nasional. (Yahya Muhaimin, 1991: 17)

Untuk mewujudkan demokrasi sistem ekonomi suatu bangsa adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian upaya mewujudkan demokrasi ekonomi adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus karena demokratisasi sistem ekonomi merupakan bagian integral dari demokratisasi berbagai subsistem kehidupan sosial bangsa itu. Sesuai dengan penjelasan yang ada pada UUD 45, kebijaksanaan ekonomi oleh pemerintah mencerminkan semangat para penyelenggara negara dan para pemimpinnya dalam menjalankan kebijaksanaan itu. (Anwar Nasution, 1994:59)

listik yang bercorak liberal kapitalistik teramat mewarnai perekonomian Indonesia. Pada periode ini sistem perekonomian Nasional belum lahir, karena politik menjadi "panglima" dalam strategi pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mulai menyusun sistem ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Mula-mula melalui sistem ekonomi Komando yang sentralistik (1959-1966) yang karena gagal total, selanjutnya menuju sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi pasar bebas (1966-1973), namun orientasi sistem ekonomi yang terencana melalui Repelita ini sempat nyaris hilang oleh "booming minyak" hingga paruh 1987. Hal ini perlu disikapi dari "ekonomi minyak" menjadi "ekonomi non-minyak" yang diprediksikan akan mampu melahirkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam rangka memasuki abad 21 dengan industri yang kuat, pertanian yang tangguh dan sektor jasa yang handal (mubyarto, 1995: 123). Dalam Repelita IV disebutkan bahwa dalam pembangunan Indonesia, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi akan ditentukan dengan kemajuan di bidang industri baik industri besar --hulu atau hilirnya, atau peningkatan industri kecil yang lebih dikenal dengan industri rakyat. (Satraatmadja, 116: 1986)

Mubyarto (1995: 124) mengungkapkan bahwa pada periode 1987-1994 terjadi proses konglomerasi yang sangat meningkatkan ketimpangan ekonomi, yang selanjutnya dicegah perkembangannya oleh GBHN 1993. Periode 1994-2001 adalah periode awal proses tinggal landas dimana ekonomi rakyat memperoleh rangsangan besar untuk berkembang. Format ekonomi nasional ini biasa dikenal dengan sebutan ekonomi tinggal landas, dimulai Repelita VI (1994-1999), dan diperkirakan akan berlangsung selama 25 tahun (1994-2019), tahapan ekonomi tinggal landas (baca: PJP II) berbeda dengan tahapan pembangunan akselerasi 25 tahun pertama (1969-1994) yang biasa disebut PJP I -- yang cenderung sangat mementingkan pertumbuhan dengan mengandalkan sektor modern, khususnya industri substitusi impor dan industri ekstra aktif hutan dan minyak bumi. Sementara PJP II cenderung berorientasi pada pemerataan dan keadilan sebagai stresing dalam pembangunan nasional.

Pilihan antara kebijakan yang pro pertumbuhan ataukah yang pro pemerataan, dalam pembangunan nasional, tidaklah datang dengan sendirinya. Kebijakan yang pro pertumbuhan menciptakan iklim yang merangsang peningkatan mobilitas tabungan nasional, investasi, inovasi serta pengembangan teknologi. Sasaran pembangunan yang pro pemerataan adalah untuk mendistribusikan

produksi (pendapatan dan kekayaan) nasional yang sudah ada. Retribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat, tanpa pertumbuhan ekonomi adalah merupakan zero sum game, artinya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya. (Anwar Nasution, 1994: 60)

Melihat orientasi PJP II, maka ini merupakan peluang bagi rakyat Indonesia untuk melalui suatu "kehidupan baru" yang berdimensikan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial-- yang tercantum tegas pada pasal 33 UUD 1945, bahwa roda perekonomian nasional digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral, mewujudkan keadaan pemerataan sosial ekonomi menuju kesiimbangan, keserasian dan keselarasan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan nasional, prioritas pembangunan ekonomi yang kuat dan tangguh, koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dan perencanaan sentral dalam dengan kebijaksanaan ekonomi nasional. --Sistem ini ekonomi kerakyatan menemui urgensitasnya. Kepastian pembangunan ekonomi yang memihak rakyat ini teramat mendesak untuk dipercepat realisasinya, bukan adanya ungkapan pidato Presiden Soeharto dihadapan DPR dengan tekad melaksanakan ekonomi kerakyatan, namun karena UUD 1945 lewat pembukaan dan batang tubuhnya-- teks dan kontekslah telah lama mengaturnya. Dan perekonomian Indonesia yang berorientasi kerakyatan sesungguhnya

telah jauh-jauh hari jelas dirumuskan oleh para *found-
ing father* diawal berdirinya RI, yang pada perkem-
bangannya telah mengarah pada satu bentuk baru : **Sistem
Ekonomi Pancasila** (P.C. Suroso, et al., 1984: 19)
Dimana penekanan sistem tersebut pada demokrasi ekonomi
yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan
aktif dalam kegiatan pembangunan --yang secara tegas
juga digariskan oleh GBHN 1993 (BP 7 Pusat, 1993: 176).

Maka, sebagai strategi dalam pelaksanaan kebijaksa-
naan pembangunan, Trilogi pembangunan tetap menjadi
tumpuan dengan menekankan pemerataan pembangunanan
hasil-hasilnya menuju terwujudnya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pertumbuham ekono-
mi yang cukup tinggi (Mubyarto, 1988: 61)

D. Era-APEC, Menuju Tatanan Baru Ekonomi Indonesia

Munculnya Amerika Serikat sebagai adi daya, Eropa
dan Jepang sebagai negara industri yang maju serta
sebagai aktor utama, status peningkatan beberapa negara
berkembang menjadi negara industri baru. Namun peruba-
han yang paling relevan adalah masuknya isu-isu
ekonomi nasional internasional ke dalam percaturan
politik internasional --masalah-masalah, seperti ke-
langkaan dan kenaikan harga minyak bumi, nilai tukar
komuditi ekspor dari negara-negara kurang berkembang

dan aturan main perdagangan yang merugikan mereka, defisit pembayaran maupun neraca pembayaran berbagai negara (Mochtar Mas'oed, 1994: 42). Sementara diplomasi antar negara-negara dunia selatan juga menunjukkan betapa isu ekonomi semakin jelas mewarnai diplomasi tingkat tinggi.

Dinamika perjuangan negara-negara dunia ketiga membuat persoalan ekonomi dan politik menjalin dan sulit dipisahkan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Naisbit dalam bukunya *Global Paradox* bahwa peta perekonomian di lingkaran pasifik, meniupkan optimisme tinggi terhadap peluang bisnis di kawasan ini. Ini didasarkan penampilan impresif negara-negara di wilayah ekonomi potensial, seperti Asia Timur dan Amerika Latin dan Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. (Edents, Juni 1995: 15)

Seperti yang dikatan diatas, bahwa ide pembentukan Asia Pasific Cooperation (APEC), selain dalam kerangkaan realisasi GATT/WTO (*General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization*) dan menyikapi gagalnya Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) (GATRA, 19 November 1994: 31) juga didasarkan pada realita bahwa kawasan forum yang beranggotakan 18 negara ini, berkumpul banyak "bintang"ekonomi dunia. Terdapat AS, Jepang, Kanada, China, "empat macan Asia" (Korsel, Hongkong,

Taiwan, dan Singapura), Tiga macan kecil Asia Tenggara (Thailan, Malaysia dan Indonesia), serta Australia dan New Zeland, mereka inilah yang telah tampil sangat impresif mewarnai perekonomian dunia dalam dasawarsa terakhir (A. Tony Prasentiantono, 1995:358).

Sebuah dunia perdagangan bebas, yang dicita-citakan oleh negara-negara --khususnya negara-negara APEC. Dari banyak pertemuan yang diadakan masing-masing delegasi sepakat bahwa lalu lintas perdagangan dan investasi antar negara perlu dibuat longgar. Mengingat investasi dan perdagangan merupakan motor pertumbuhan ekonomi suatu negara --tak terkecuali Indonesia (Warta Ekonomi, Desember 1994: 20).

Sebagai bagian dari komunitas dunia, dalam melaksanakan kesepakatan GATT Indonesia tidak hanya dihadapkan pada aspek ekonomi ekonomis, tetapi juga politis, yaitu mencakup hubungan Indonesia dengan luar negeri dan tantangan Indonesia sudah jelas, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional tanpa melanggar kesepakatan GATT (Hartarto, September 1995: 19).

Keterlibatan Indonesia semakin jelas akan membuka peluang yang kian makin besar --secara politik maupun ekonomis-- lewat keterlibatannya dalam APEC, tentu dengan catatan bila Indonesia mampu memanfaatkannya.

Untuk itu keterlibatan Indonesia tidak hanya sekedar pilihan, karena apa yang dikatakan oleh Presiden Soeharto "bangsa Indonesia tidak mungkin menghindari arus perubahan dunia menuju zaman baru", yakni era ekonomi terbuka dalam perdagangan bebas. (jawa Pos, 12 Desember 1995)

Keterlibatan Indonesia dalam GATT (baca: APEC) disamping ditolaknyaa dan tidak mentolelir segala bentuk proteksi, dan semacamnya --bila Indonesia tidak ingin terlibas keterlibatannya dalam perdagangan bebas--, semakin tinggi akan permintaan pasar luar negeri pada produk dalam negeri.

Dan yang terpenting keterlibatan Indoensia di APEC atau leberalisasi perdagangan, adalah adanya tantangan akan pengembangan sumber daya yang mempunyai keunggulan kompetitif tinggi agar mampu dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peran pelakunya melalui peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan maupun menikmati hasil pembangunan. Dan terjadinya keterbukaan perdagangan atau kerja sama ekonomi regional maupun internasional akan semakin tinggi, sehingga persaingan peningkatan kualitas dan efisiensi teknis maupun ekonomis dalam keseluruhan sektor perekonomian, terutama sektor yang mempunyai tingkat kompetisi tinggi (Hartarto, 1994: 24)

Tetapi persoalannya, sejauh mana kesiapan perekonomian Indonesia dalam menjemput tantangan liberalisasi perdagangan atau pasca bebas-APEC dunia, sebab bagaimanapun keterlibatan ini akan memberikan implikasi besar --yang tidak hanya pada tatanan ekonomi Indonesia tetapi juga pada tatanan politik Indonesia, budaya, sosial dan seterusnya, dan itu akan membawa kemajuan bagi pembangunan ekonomi Indonesia (GATRA, 19 Nopember: 32). Namun APEC, menurutnya pula akan menjadi ancaman bila perekonomian Indonesia tidak segera dipersiapkan untuk menghadapi arus perdagangan global. Sementara dia melihat perekonomian Indonesia masih dipenuhi bentuk-bentuk perekonomian tak sehat.

Yang penting, harus disadari leberalisasi --seperti yang diungkapkan Prof. Suhadi Mangkusowondo, anggota EPG (*Eminent Person Group*) -APEC-- selalu diartikan sebagai proses pengurangan hambatan, baik tarif maupun non tarif, serta pengurangan kendala investigasi secara administratif maupun teknis (Awani Irewati dalam Jawa Pos, 22 November : 1995). Maka betapa banyak yang mesti Indonesia benahi dalam rangka liberalisasi atau pasar bebas-APEC.